

Gambaran Umum



Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh merupakan perangkat provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur Aceh dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh.

Kelembagaan struktur organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
4. Bidang Perikanan Tangkap
5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi Pemerintah Aceh

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017-2022 yaitu **“TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI”**.

Misi Pemerintah Aceh

Sepuluh (10) misi utama yaitu :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan budaya ke-Acehan;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi dan berkualitas;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;

8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Tugas Pokok

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;

- c. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

- i. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- k. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;

- o. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- p. Pembinaan UPTD; dan
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

Program Kerja Pemerintah Aceh bidang perikanan dan kelautan :

- 1. Aceh Meugoë dan Meulaôt
- 2. Acèh Peumulia
- 3. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
- 4. Acèh Green

A. Tujuan Aceh Meugoe dan Meulaot :

- 1. Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 2. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;

3. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;
4. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
5. Kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
6. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.

Sasaran Tujuan Aceh Meugo dan Meulaot yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh;
2. Menurunnya jumlah daerah rawan pangan Aceh;
3. Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam pada bidang Kelautan dan Perikanan secara lestari dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pada bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Meningkatnya produk unggulan kelautan dan perikanan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan daerah.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh Meugo dan Meulaot:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4. Program Pengembangan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi;
10. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

B. Tujuan Aceh Peumulia :

1. Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli);

2. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e- kinerja;
3. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan
4. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Sasaran Tujuan Aceh Peumulia yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana kelembagaan dinas, pengelolaan sumberdaya manusia, dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
2. Meningkatnya kinerja dan layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh Peumulia:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi;

C. Tujuan Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu):

1. Pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan.

Sasaran Tujuan Aceh SIAT yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan :

1. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip *Evidence Based Planning*.
2. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh SIAT :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

D. Tujuan Aceh Green :

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;

1. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
2. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
3. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat;
4. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
5. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (*wood polymer composite*) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

Sasaran Tujuan Aceh Green yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan:

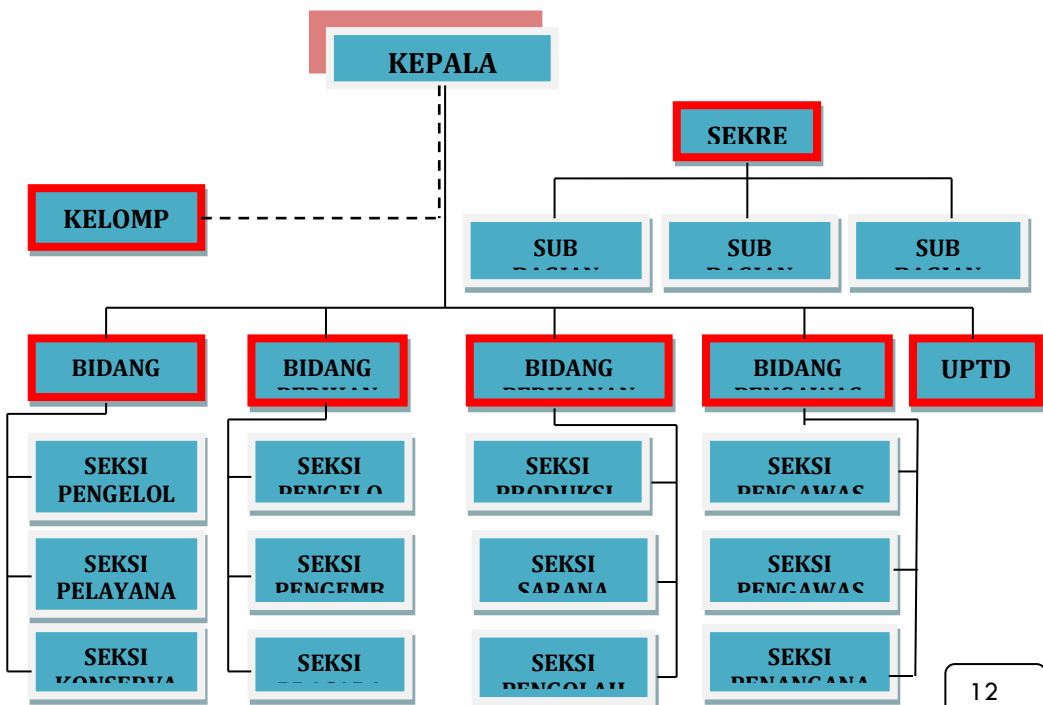
1. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

2. Meningkatkan rehabilitasi vegetasi pantai dan vegetasi mangrove di kawasan pesisir.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh Green :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan.

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



Capaian Kinerja Perikanan Aceh

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diukur dari capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1. Setiap indikator memiliki sasaran yang bertujuan untuk mensejahterakan petani dan nelayan sesuai dengan Tupoksi

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Adapun sasaran dan indikator tersebut sebagai berikut.

- a. Meningkatnya produksi perikanan dan produktivitas usaha, dengan indikator kinerja peningkatan produksi perikanan yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya;
- b. Meningkatnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan, dengan indikator kinerja Nilai Konsumsi Ikan;
- c. Meningkatkan pembangunan sektor perikanan, dengan indikator kinerja Persentase kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB.
- d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan, dengan indikator cakupan bina kelompok nelayan;
- e. Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah, dengan indikator Produksi perikanan kelompok nelayan (produk olahan kelautan dan perikanan);
- f. Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, Nilai Tukar Nelayan (NTN);

Tabel 1. Realisasi Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						13
1	Produksi Perikanan	Ton	391.094,00	344.850,42	88,17	
	a. Perikanan Budidaya		127.500	107.719,46*	84,48	
	b. Perikanan Tangkap		263.594	237.130,96*	89,96	
2	Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	42,66	54,49	127,73	
3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	4,71	5,07*	107,64	
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelp	90	86	95.56	
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	201.152	195.583*	97	
6	Nilai Tukar Nelayan	NTN	110,35	101,90	92,34	

Sumber: LKPJ DKP ACEH 2019

Keterangan : *) = angka sementara.

Geografis Provinsi Aceh

Provinsi Aceh yang terletak diujung paling barat pulau Sumatera. Letaknya sangat strategis, dikelilingi oleh laut (Selat Malaka, Sela Benggala dan Samudera Indonesia), juga terletak pada persimpangan arus dan gerakan Samudera Hindia dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Secara umum, hubungan laut yang langsung tersebut, dapat berinteraksi dengan mudah ke daratan Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, Kepulauan Andaman dan Nikobar. Provinsi Aceh terletak pada koordinat $2^{\circ} - 6^{\circ}$ Lintang Utara dan $95^{\circ} - 98^{\circ}$ Bujur Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Selat Benggala
- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia, dan
- Sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Utara

Aceh sebagai minoritas dari wilayah Indonesia secara keseluruhan, luas wilayah daratan Aceh mencapai 57.365,57 km² atau 5.736.557 ha. Panjang pantai Aceh mencapai 2.666,27 Km, yang terdiri atas pantai di pulau utama dengan

panjang 1.253,58 Km dan sepanjang 1.412,69 Km pantai pada pulau-pulau besar dan kecil lainnya (*Selayang Pandang Pesisir & Laut Aceh*, 2012). Provinsi memiliki luas laut kewenangan seluas 12 mil. Sedangkan kabupaten/kota hanya 4 mil. Untuk kategori kabupaten/kota kabupaten Simeulue yang paling luas wilayah laut kewenangannya (WLK) yaitu 3.358,32 km², disusul dengan Kabupaten Aceh Singkil seluas 2.642,92 km². Sedangkan yang paling kecil Wilayah Laut Kewenangannya adalah Kota Langsa yaitu 69,36 km², yang disusul dengan Kota Banda Aceh seluas 83,52 km². Untuk lebih memudahkan dalam mengetahui luas laut kewenangan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1.

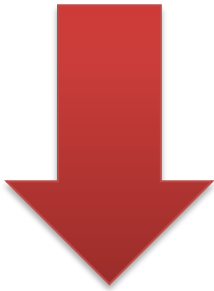
Potensi Perikanan Aceh

Provinsi Aceh menyimpan potensi ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang sangat besar, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya (laut, payau dan air tawar), pengolahan hasil perikanan dan juga pariwisata bahari.

Pembangunan Perikanan dan Kelautan ke depan selain diharapkan dapat mengisi permasalahan yang ada di sektor perikanan dan kelautan juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah/ nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan

pembudidayaan ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

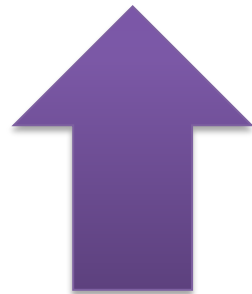
Potensi Lestari Perikanan



Potensi Lestari Perikanan Tangkap (MSY) 272.707 Ton, dengan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 sebesar 237.130,96 Ton



“penangkapan ikan dilaut menduduki peringkat pertama untuk komoditas





Gambar I. Peta Provinsi Aceh

Profil Dinas Kelautan dan Perikanan

Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap Provinsi Aceh terdiri dari perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Aceh dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2019 (Ton)

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017 (Satu Data KKP)	2018	2019*
Perikanan Laut	173,066.90	182,464.44	208,200.83	235,589.28	240,589.28
Perairan Umum	1,726.40	1,726.44	1,441.68	1,541.68	1,541.68
Jumlah	174,793.30	184,190.88	209,642.51	237,130.96	242,130.96

Sumber : DKP Aceh, 2020

Produksi perikanan tangkap ekonomis penting di Provinsi Aceh terdiri dari 15 jenis ikan dari kelompok ikan pelagis, kelompok ikan demersal, dan kelompok non-ikan (udang, crustacea dan molusca). Provinsi Aceh memiliki komoditi perikanan tangkap ekonomis dan bernilai ekspor antara lain Tuna, Cucut, Tongkol, Bawal Putih, Bawal Hitam Tenggiri, Kerapu dan Lobster. Produksi perikanan ekonomis penting dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi Perikanan Tangkap Ekonomis Penting Tahun 2015-2019 (Ton)

No	Jenis Ikan	2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan
1	Tuna *)	6,545.0	7,302.3	19,403.2	27,102.3	29,201.2	Beberapa jenis ikan ekonomis penting *) Komoditi Ekspor
2	Cucut *)	524.1	552.0	361.8	572.0	631.8	
3	Tongkol	30,836.5	29,749.4	75,406.2	99,749.4	105,406.2	
4	Cakalang	12,084.0	12,932.3	6,543.1	12,932.3	16,043.1	
5	Kwee *)	5,985.8	6,091.2	2,210.3	7,090.2	7,210.3	
6	Kakap	5,248.7	6,072.0	18,786.8	16,052.0	21,786.8	
7	Bawal Putih *)	370.8	274.2	328.4	374.2	382.4	
8	Bawal Hitam *)	1,752.5	1,750.3	3,509.5	3,700.5	4,509.5	
9	Tenggiri *)	4,838.5	4,752.2	8,089.1	9,452.2	9,089.1	
10	Teri	7,582.5	8,019.8	2,661.1	9,019.8	12,661.1	
11	Pari *)	426.2	542.0	1,937.7	1,542.0	1,137.7	
12	Kerapu *)	5,870.8	6,127.0	1,631.3	8,117.0	9,031.3	
13	Kembung *)	14,899.4	19,241.3	7,908.0	21,241.3	27,908.0	
14	Lobster *)	646.6	129.0	7,318.0	7,129.0	7,518.0	
15	Kepiting/Rajungan *)	1,631.7	1,639.0	8,505.0	8,639.4	9,305.1	

Sumber : DKP Aceh, 2020

Perikanan Budidaya

Kegiatan perikanan budidaya di Provinsi Aceh dilakukan di air tawar (kolam, karamba, KJA, sawah), air payau (tambak), dan laut.

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Aceh dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi perikanan budidaya di Provinsi Aceh dari Tahun 2015-2019 (ton)

KATEGORI	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Perikanan Budidaya	64,081.86	82,546.26	100,809.40	82,546.26	117.492,51
- Budidaya Tambak	42,222.61	57,385.31	-	57,385.31	76.930,56
- Budidaya Tambak Sederhana	-	-	3,976	-	11.863,00
- Budidaya Tambak Semi Intensif	-	-	57,770.78	-	62.335,92
- Budidaya Tambak Intensif	-	-	821.09	-	2.731,64
- Budidaya Kolam	18,614.31	20,813.06	35,092.45	20,813.06	37.146,12
- Budidaya Karamba	-	-	20.56	-	-
- Budidaya Karamba Jaring Apung Tawar	300.25	499.19	342.10	499.19	651,35
- Budidaya Karamba Jaring Tancap Tawar	799.5	1,470.40	843	1,470.40	1.267,45
- Budidaya Sawah	1,987.66	2,204.25	1,271.88	2,204.25	1.155,36
- Budidaya Jaring Apung Laut	157.53	174.05	671.47	174.05	341,67
- Budidaya Laut	-	-	-	-	-

Sumber : DKP Aceh, 2020

Tabel 5. Data jumlah RTP dan luas pemeliharaan di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	RTP (Unit)	LUAS (Ha)	RTP (Unit)	LUAS (Ha)	RTP (Unit)	LUAS (Ha)	RTP (Unit)	LUAS (Ha)	RTP (Unit)	LUAS (Ha)
Budidaya Tambak	25,273	50,630.72	27,431	53,392.87	-	-	-	-	-	-
Budidaya Tambak Sederhana	-	-	-	-	15,780	19,790.06	16	19,790.06	16	22,790.06
Budidaya Tambak Semi Intensif	-	-	-	-	13,370	41,223.20	13	41,223.20	13	43,223.20
Budidaya Tambak Intensif	-	-	-	-	439	56.408	439	56.408	439	56.408
Budidaya Kolam	13,963	3,362.5	16,389	3,879.72	16,499	3,239.06	16	3,239.06	16	3,239.06
Budidaya Karamba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budidaya Karamba Jaring Apung Tawar	142	0.7	175	0.77	38	0.62	38	0.62	38	0.83
Budidaya Karamba Jaring Tancap Tawar	580	3.0	597	3.09	20	3.13	20	3.13	20	3.13
Budidaya Sawah	6,934	2,971.8	3,290	2,984.80	3,300	1,442.5	3	1,442.5	3	1,442.5
Budidaya Jaring Apung Laut	382	3.6	633	7.78	644	7.78	644	7.78	644	7.78
Budidaya Laut	-	-	-	-	18	-	18	-	18	-
Jumlah	47,274.00	56,972.30	48,515.00	60,269.03	50,108.00	64,320.26	50,108.00	64,320.26	50,108.00	69,341.58

Sumber : DKP Aceh, 2020

Secara umum jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) budidaya dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Data jumlah RTP, luas pemeliharaan di Provinsi Aceh dari tahun 2015-2019 disajikan dalam Tabel 5.

Provinsi Aceh memiliki komoditas ekonomi di bidang perikanan budidaya, antara lain Bandeng, Udang Windu, Udang Vaname, Ikan Mas, Nila, Lele, Kerapu dan Gurami. Produksi Komoditas Ekonomis Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Produksi Komoditas Ekonomis Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh 2015-2019 (ton)

URAIAN	TAHUN (Ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bandeng	24,930.73	30,536.81	8,708.84	16.636,92	16.967,87
Udang Windu	8,114.01	9,418.04	16,349.39	12.796,43	13.820,14
Udang Vaname	4,469.46	11,679.12	17,265.60	18.121,52	19.571,00
Ikan Mas	6,552.04	6,366.53	6,346.56	6.946,65	7.502,
Nila	6,038.17	6,503.69	28,058.20	25.346,73	26.374,
Lele	5,129.26	6,793.12	13,140.86	10.465,92	9.381,
Kerapu	840.9	1,036.93	258.8	688,40	643,47
Gurami	351.1	101.3	537.6	402,30	404,
Jumlah	56,425.69	72,435.54	90,665.74	91.404,87	94.664,84

Pengolahan Hasil Perikanan

Aktivitas usaha pengolahan hasil perikanan di Provinsi Aceh secara umum masih didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah. Dalam upaya memaksimalkan hasil perikanan dan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi maka diperlukan pengolahan hasil perikanan untuk memperoleh produk berkualitas sehingga memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil produk perikanan. Banyaknya unit pengolahan hasil perikanan di Provinsi Aceh pada tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Produksi UPI di Provinsi Aceh 2018-2019 (ton)

No	Data Statistik	Produksi (Ton)	
		2018	2019*
1.	UPI Mikro	26.451.634	20.261.644
2.	UPI Besar	51.014	45.101

Keterangan : *) = angka sementara;

Sumber data :One Data KKP, 2020

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupaya untuk terus menjalin koordinasi, senergi dan integrasi dengan instansi terkait melalui suatu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Hasil pemantauan Illegal Fishing di Perairan Aceh dari tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 8.

Pencapaian penting selama periode tahun tersebut diantaranya dapat dilihat dari jumlah kasus pidana dan pelanggaran yang diproses baik dilakukan oleh PPNS Perikanan maupun Instansi terkait bidang perikanan, Advokasi/ Nelayan terdampar dari Luar Negeri yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya, Peningkatan kapal-kapal yang berizin, Pelaksanaan Patroli Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 571 dan WPP 572, Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta peningkatan kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan instansi terkait di bidang perikanan. Kegiatan advokasi/pemulangan nelayan dan musibah dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 8. Hasil Pemantauan *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

No	Illegal Fishing	2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan
1.	DILAKUKAN OLEH KAPAL IKAN ASING	2	11	2	2	2	Ditenggelamkan/dimusnahkan : 1. KM 026 tgl 20 Mei 2015 Aceh Timur. 2. KHF 1780 tgl. 20 Oktober 2015 Kota Langsa. Kerjasama DKP Aceh dengan PSDKP Jakarta dan TNI – AL Lanal Lhokseumawe PKFB Malaysia sudah eksekusi tgl 5 April 2016 KM.KHF 1959 Malaysia Sudah eksekusi tgl 5 April 2016 Ditangkap Oleh KKP Kapal Hiu 12 Beserta PSDKP Lampulo
2.	DILAKUKAN OLEH KAPAL LUAR PROVINSI ACEH	-	-	-	-	-	-
3.	DILAKUKAN OLEH KAPAL IKAN LOKAL (PROVINSI ACEH)	2	-	3	-	-	SLFA 4641 ditangkap oleh kapal hiu 12 (penyidik PSDKP Lampulo) SLFA 4948 ditangkap oleh kapal hiu 12 (penyidik PSDKP Lampulo)
Jumlah		4	11	5	2	2	-

Sumber DKP Aceh, 2020

Tabel 9. Advokasi/pemulangan nelayan/musibah

No	TAHUN	ADVOKASI/NELAYAN YANG DIPULANGKAN DARI LUAR NEGERI	NELAYAN MUSIBAH	KETERANGAN
1	2012	10 orang	-	
2	2013	5 Orang	14 Orang	
3	2014	4 Orang	7 Orang	
4	2015	2 Orang	4 Orang	
5	2016	4 orang		Terdampar ke Malaysia
6.	2017	27 orang		2 org terdampar ke Malaysia, musibah ditengah laut yang dapat diselamatkan
7.	2018	2 orang		2 orang selamat, 2 orang tidak ditemukan
		5 Orang		KW Wulandari Kab. Aceh Tamiang (sedang dalam proses)

Produksi Garam

Tabel 10. Produksi Garam tambak 2018-2019

No	Data Statistik	Produksi (Ton)	
		2018	2019*
1.	Garam Tambak	-	35.346
2.	Garam Non Tambak	17.274	12.548

Keterangan : *) = angka sementara;

Sumber data :One Data KKP, 2020

Pada Tabel 10 dapat kita lihat peningkatan jumlah produksi garam rakyat yang terus mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi yang menerapkan sistem rumah tunnel garam.